

Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa dalam Menanggulangi Kemiskinan: Studi Literatur

Dinda Rizki Yanti*, Anggi Agustina, Saniyyah Defna, Dila Erlianti

STIA Lancang Kuning Dumai

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.431>

*Correspondence: Dinda Rizki Yanti

Email: rizkyyantidinda@gmail.com

Received: 28-03-2026

Accepted: 19-04-2026

Published: 07-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun permasalahan kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan, masih menjadi tantangan utama. Ketimpangan antara desa dan kota serta keterbatasan akses ekonomi menyebabkan masyarakat desa lebih rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai salah satu kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dan memberdayakan masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKTD memiliki dampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena bersifat jangka pendek, keterbatasan anggaran, serta kendala dalam implementasi seperti kapasitas aparatur desa dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Program Padat Karya Tunai Desa dapat menjadi instrumen yang cukup efektif dalam mengurangi tekanan ekonomi masyarakat miskin, namun belum mampu menanggulangi kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata kunci: PKTD, Penanggulangan Kemiskinan, Pembangunan Desa, Tenaga Kerja, Kesejahteraan Masyarakat

Pendahuluan

Pada dasarnya, pembangunan dalam suatu negara merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan oleh semua lapisan. Untuk mencapai hal tersebut, pembangunan dilakukan secara terencana dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang tepat dan berkeadilan agar setiap warga negara dapat hidup dengan layak serta tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia ([Sumarto & Dwiantara, 2019](#)).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 78 ayat (1), pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup manusia. Hal tersebut dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan adanya landasan hukum tersebut, pemerintah desa dibentuk sebagai pihak yang memiliki

kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya desa serta melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan guna mendorong pemberdayaan masyarakat desa ([Basri, 2021](#)).

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029, khususnya pada Asta Cita poin ke-6, ditegaskan pentingnya pembangunan yang dimulai dari desa dan dari bawah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, serta pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa desa menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Penetapan desa sebagai fokus pembangunan tidak terlepas dari masih adanya kesenjangan antara wilayah desa dan kota, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

Perkembangan pembangunan di wilayah perkotaan yang berlangsung pesat turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah perdesaan. Sementara itu, kondisi sarana dan prasarana di desa yang masih terbatas menjadi salah satu faktor yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Ketimpangan ini kemudian mendorong meningkatnya arus urbanisasi dari desa ke kota. Masyarakat desa cenderung berpindah ke perkotaan dengan harapan memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, tingginya tingkat urbanisasi tersebut justru memunculkan berbagai permasalahan baru di perkotaan, baik dari segi sosial maupun lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kriminalitas, persoalan pengelolaan sampah, serta munculnya permukiman kumuh di wilayah perkotaan ([Kurnia & Widhiasthini, 2021](#)).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 23,85 juta orang atau sekitar 8,47 persen dari total populasi. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang mencapai 25,22 juta orang. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, terutama jika dilihat dari perbedaan antarwilayah. BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan sebesar 11,03 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang sebesar 6,73 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia masih cenderung terkonsentrasi di wilayah perdesaan yang sekaligus mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan antara desa dan kota ([Primantoro, 2025](#)).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Dengan demikian, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan ([Tiara Rama Dian, 2019](#)).

Berikut data perkembangan kemiskinan yang ada di Indonesia:



Gambar 1.1. Profil Perkembangan Kemiskinan di Indonesia 2014 – 2025
 Sumber Data: Badan Pusat Statistik Tahun 2026

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode Maret 2014 hingga Maret 2025 cenderung mengalami fluktuasi. Pada awal periode, jumlah penduduk miskin berada di kisaran lebih dari 28 juta jiwa, kemudian secara bertahap mengalami penurunan hingga mencapai titik yang lebih rendah pada tahun-tahun berikutnya. Namun, pada periode tertentu, terutama sekitar tahun 2020, angka kemiskinan kembali mengalami peningkatan yang dapat dikaitkan dengan kondisi ekonomi nasional pada saat itu.

Memasuki periode setelahnya, angka kemiskinan kembali menunjukkan tren penurunan hingga pada Maret 2025 tercatat sebesar 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47 persen dari total penduduk. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak serta-merta menghilangkan permasalahan kemiskinan di Indonesia karena jumlahnya masih tergolong besar dan menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu terus ditangani melalui kebijakan dan program pemerintah yang tepat.



Gambar 1.2. Profil Perkembangan Kemiskinan di Indonesia 2014 – 2025

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Tahun 2026

Selain itu, berdasarkan Gambar 1.2, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan jika dilihat berdasarkan wilayah dan karakteristik daerah. Secara umum, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di desa cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di kota.

Jika dilihat berdasarkan pulau, jumlah dan persentase penduduk miskin juga tersebar tidak merata dengan beberapa wilayah masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga terkait dengan ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata, khususnya di wilayah perdesaan yang masih menjadi kantong kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa sebagai bagian dari penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan. Program ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang menyasar keluarga miskin, pengangguran, serta keluarga dengan balita yang mengalami masalah gizi, melalui kegiatan produktif yang

memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta berkontribusi dalam penurunan angka stunting. Selain itu, Program Padat Karya Tunai juga menitikberatkan pada penyerapan tenaga kerja secara maksimal melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaannya mengadopsi konsep *cash for work*, yaitu pemberian upah secara langsung kepada pekerja, baik secara harian maupun mingguan ([Tiara Rama Dian, 2019](#)).

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) diartikan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, terutama bagi kelompok miskin dan marginal yang bersifat produktif. Program ini dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja, serta teknologi lokal guna memberikan tambahan pendapatan, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program tersebut dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selain itu, PKTD juga menitikberatkan pada penyerapan tenaga kerja secara maksimal melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu adapun tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa dalam menanggulangi kemiskinan di beberapa wilayah Indonesia dan apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program tersebut.

Penulisan ini tidak berfokus pada satu lokasi tertentu melainkan menggunakan berbagai hasil penelitian dari beberapa daerah di Indonesia sebagai bahan analisis. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan kemiskinan dan implementasi PKTD memiliki karakteristik yang beragam di setiap daerah.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di berbagai wilayah di Indonesia, hasil kajian yang diperoleh masih menunjukkan variasi. Sejumlah penelitian menemukan bahwa PKTD mampu meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa, namun terdapat pula temuan yang menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek implementasi program di tingkat lokal, sementara kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas PKTD dalam menanggulangi kemiskinan secara lebih luas dan komprehensif masih terbatas. Dengan demikian, penulisan ini terdapat mendorong perlunya kajian lebih lanjut melalui pendekatan studi literatur untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas PKTD dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, implementasi Program Padat Karya Tunai Desa menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini mengingat program tersebut bertujuan

untuk mengurangi kemiskinan serta memberdayakan masyarakat miskin dan marginal, khususnya di wilayah perdesaan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas program tersebut dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. ([Lexy J Moleong, 2011](#)). Dalam kajian literatur, peneliti menelaah beragam sumber informasi seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, laporan penelitian 2019-2025, serta berbagai sumber daring lainnya yang dianggap relevan dan mendukung topik kajian. ([Damanik, 2024](#))

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian tematik yang bersifat deskriptif, dan penarikan kesimpulan yang menghubungkan hasil kajian literatur dengan teori serta fakta empiris yang mendukung.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah berbagai sumber yang relevan, seperti buku dan jurnal ilmiah, ([Lexy J Moleong, 2011](#)). Selain itu juga dari laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta situs resmi lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program Keluarga Berencana di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas, relevansi, serta kemutakhiran informasinya.

Meskipun kajian ini bergantung pada data sekunder yang memiliki keterbatasan dalam hal pemerataan dan kedalaman informasi, upaya untuk meminimalkan bias dilakukan dengan cara memilih sumber yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Program Padat Karya Tunai Desa

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah program pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis kerja dan upah tunai, terutama untuk penganggur, miskin, dan kelompok marginal lainnya. Prinsip cash for work—memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan—menjadi dasar program ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PKTD adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang miskin dan marginal dan berfokus pada pemanfaatan teknologi lokal dan tenaga kerja ([Novanto & Wibawani, 2023](#)).

Dari perspektif kebijakan publik, PKTD dianggap sebagai program di tingkat desa untuk menangani kemiskinan dan ketimpangan. Studi menunjukkan bahwa PKTD berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja jangka pendek sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat miskin dengan memberikan upah harian atau mingguan. Dalam konteks ini, PKTD adalah kebijakan sosial ekonomi yang bertujuan untuk membantu kelompok rentan memperoleh penghasilan tambahan dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial non-kerja ([Novanto & Wibawani, 2023](#)).

PKTD sering didefinisikan dalam perspektif implementasi kebijakan sebagai program yang dilaksanakan melalui penggunaan sebagian Dana Desa untuk kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemanfaatan lahan tidur, dan normalisasi saluran irigasi. Menurut penelitian implementasi kebijakan, PKTD bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan desa dan meningkatkan kapasitas lokal melalui kerja kolektif yang dibayar tunai. Oleh karena itu, PKTD dapat dianggap sebagai kebijakan pemberdayaan ekonomi dan sosial yang memadukan elemen penguatan infrastruktur desa dengan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin ([Natalia & Sukmana, 2025](#)).

Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat marginal secara swakelola yang dikenal sebagai Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di desa melalui penyediaan lapangan kerja. Diharapkan bahwa program PKTD akan mengutamakan karyawan dan bahan baku yang ada di desa sehingga perputaran uang tetap ada di desa. Ini akan memungkinkan masyarakat perdesaan untuk meningkatkan daya beli mereka ([Setiawan & Megawati, 2022](#)).

Mekanisme Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa

Mekanisme Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dapat dijelaskan melalui beberapa tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dengan dukungan regulasi dan praktik yang telah dibahas dalam beberapa jurnal akademik terbaru (2023–2025).

a. Perencanaan dan Penetapan Kegiatan

Pada tahap awal, PKTD direncanakan melalui Musyawarah Desa (musdes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des), yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk penyusunan RAPBDes/APBDes berbasis Dana Desa. Penelitian mengenai implementasi PKTD menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sejak awal perencanaan, termasuk menentukan jenis kegiatan dan sasaran tenaga kerja, sangat penting untuk keberhasilan program, sehingga kegiatan benar-benar menyerap pengangguran dan keluarga miskin ([Purwadinata *et al.*, 2022](#)).

b. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pendataan Tenaga Kerja

Sebelum pelaksanaan, pemerintah desa membentuk TPK untuk mengelola pengelolaan teknis dan administrasi PKTD. Penelitian tentang implementasi kebijakan PKTD menunjukkan bahwa TPK kemudian melakukan pendataan dan verifikasi tenaga kerja, terutama mereka yang miskin dan setengah penganggur. Oleh karena itu, pemanfaatan tenaga kerja lokal merupakan indikator penting dalam pelaksanaan PKTD ([Rouf et al., 2024](#)).

c. Pelaksanaan pekerjaan melalui skema swakelola

PKTD dilakukan melalui skema swakelola, yang berarti masyarakat desa mengerjakan pekerjaan langsung, dengan hanya sebagian kecil pengadaan barang dan jasa. PKTD menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, beberapa kajian menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya 30 persen dari anggaran kegiatan dialokasikan untuk upah tenaga kerja.

d. Pembayaran upah dan transparansi

Upah dibayarkan kepada peserta yang terdaftar sebagai tenaga kerja PKTD secara harian maupun mingguan secara tunai. Menurut Jurnal tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui PKTD, pembayaran upah harian dengan standar tertentu (misalnya sekitar Rp100.000 per hari) disertai dengan administrasi ketat, seperti rekap dan daftar hadir, merupakan komponen penting dari mekanisme PKTD ([Putri & Lukman, 2024](#)).

e. Pengawasan Pengawasan, pelaporan, dan evaluasi

PKTD dilakukan oleh pemerintah desa, pendamping profesional desa, dan instansi kabupaten/kota melalui pengawasan pelaksanaan dan analisis kepatuhan terhadap prinsip padat karya tunai. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan dan perbaikan mekanisme PKTD di tahun-tahun berikutnya akan bergantung pada laporan hasil kegiatan, seperti peningkatan jumlah tenaga kerja, volume pekerjaan, dan pendapatan ([Sofi, 2020](#)).

Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa

Secara keseluruhan, Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) telah dilaksanakan secara luas di Indonesia melalui pengalokasian Dana Desa pada APBDes, dengan penekanan khusus pada pemanfaatan skema swakelola dan penerimaan tenaga kerja miskin. Namun, implementasi PKTD masih berbeda-beda di setiap daerah. Di beberapa desa, implementasinya cukup efektif, tetapi di tempat lain masih kurang efektif karena kendala administratif, teknis, dan partisipatif. Kebijakan nasional memprioritaskan PKTD di banyak desa di Indonesia, memprioritaskan minimal 30% Dana Desa untuk program padat karya tunai. Perencanaan di Musdes,

penetapan kegiatan fisik dan produktif (seperti jalan desa, irigasi, pemanfaatan lahan tidur, BUMDes), dan pelaksanaan berbasis swakelola dengan tenaga kerja dan material lokal biasanya digunakan untuk implementasi ([Novanto & Wibawani, 2023](#)).

Studi "Studi Implementasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Kabupaten Purworejo melihat bagaimana PKTD diterapkan di tiga desa di wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKTD di Purworejo belum berjalan efektif secara penuh selama dua tahun pelaksanaannya. Ada kekurangan prinsip swakelola, swadaya, dan transparansi program, dan partisipasi perempuan dan transparansi data sasaran, seperti masyarakat stunting ([Adib, 2020](#)).

Desa Titian Modang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau Menurut penelitian "Implementasi Program Padat Karya Tunai di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi", program PKTD telah dilaksanakan di Titian Modang, tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik ([Andora, 2021](#)).

Di kelurahan Jeruk Kota Surabaya, program PKTD telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun program PKTD telah meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, mereka belum mencapai hasil maksimal. Ini mungkin karena masyarakat tidak memahami potensi program PKTD untuk memberikan kesejahteraan berkelanjutan. Perlu dilakukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari program PKTD. Ini dapat melibatkan penyuluhan yang lebih baik dan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi desa ([Ariel et al., 2023](#)).

Desa Cipakat di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, memiliki dua masalah utama: sasaran yang tidak tepat dan kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat. Menurut penelitian, empat tahap pemberdayaan belum dilaksanakan secara keseluruhan; dua tahap proses pemberdayaan dan pemandirian Masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, sedangkan dua tahap lainnya seleksi lokasi dan sosialisasi belum ([Haryono & Silviana, 2023](#)).

Berdasarkan teori pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan BLT dan PKTD di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan yang ditetapkan telah terpenuhi dalam pelaksanaan kebijakan Padat Karya Tunai Desa. Program BLT Dana Desa di Kecamatan Kudu juga terbukti efektif karena memenuhi persyaratan ketepatan pilihan, tujuan, waktu, dan pemantauan ([R.Jatmiko et al., 2024](#)).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa PKTD di Indonesia sudah memenuhi persyaratan efisiensi dan efektivitas lokal, seperti meningkatkan partisipasi dan pendapatan masyarakat miskin. Karena program bersifat jangka pendek, sumber daya

terbatas, dan regulasi yang belum sepenuhnya selaras antar tingkat pemerintahan, evaluasi kebijakan di Kabupaten Jembrana, Bali menunjukkan bahwa PKTD belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran secara keseluruhan ([Kurnia & Widhiasthini, 2021](#)).

Desa Sariwangi, kabupaten Bandung Barat, menemukan bahwa PKTD berjalan dengan baik dalam hal komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Namun, penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan masih terbatas dan terkendala oleh prosedur birokrasi, pelatihan, dan penyebaran material ([Rohimah et al., 2025](#)). Selain itu, penelitian implementasi di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang, menunjukkan bahwa PKTD tidak dapat menurunkan kemiskinan secara permanen karena hanya membantu kebutuhan sehari-hari tanpa menyediakan lapangan kerja jangka panjang atau peningkatan keterampilan ([Risa & Hajar, 2021](#)).

Tabel 2.1. Efektivitas PKTD dari Indikator Input–Proses–Output (adaptasi dari penelitian 2023)

| Dimensi | Indikator | Tingkat Efektivitas (%) | Kriteria Efektivitas |
|---------------|--|-------------------------|----------------------|
| Input | Ketersediaan anggaran, alat, dan bahan kerja PKTD | 80,07% | Sangat efektif |
| Proses | Kesesuaian mekanisme dengan SOP PKTD | 77,27% | Efektif |
| Output | Luas lapangan kerja, peningkatan pendapatan, partisipasi | 78,82% | Efektif |

Sumber: Penelitian “Efektivitas PKTD dalam Menopang Perekonomian Desa” (2023), yang menghitung efektivitas berdasarkan skor angket terhadap indikator input–proses–output PKTD ([Juventia, 2023](#)).

Tabel 2.2. Dampak PKTD Terhadap Tenaga Kerja dan Pendapatan Masyarakat Desa

| Variabel | Sebelum PKTD (rata-rata desa sampel) | Setelah PKTD (rata-rata desa sampel) | Perubahan (apresiasi peneliti) |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Jumlah tenaga kerja terserap | 10–15 orang per desa | 50–70 orang per desa | Meningkat signifikan |
| Tingkat partisipasi miskin (%) | ~35–40% | ~65–75% | Meningkat |
| Tambahan pendapatan per rumah tangga | ± Rp150.000–200.000 per bulan | ± Rp250.000–350.000 per bulan | Naik ± Rp100–150.000 |

Data angka dan kategori ini merupakan rangkuman/agregasi dari beberapa penelitian lapangan (skripsi dan jurnal terkait PKTD) yang menunjukkan bahwa PKTD cenderung mampu menambah jumlah tenaga kerja yang terserap dan meningkatkan

pendapatan rumah tangga miskin, meskipun sifatnya masih jangka pendek dan lokal ([Rahayu et al., 2025](#)).

Tabel 2.3. Implementasi PKTD di beberapa desa (berdasarkan studi kasus)

| Desa / Wilayah | Provinsi | Tenaga kerja per kegiatan PKTD (rata-rata) | Keterlibatan warga miskin | Catatan singkat |
|-------------------------------|------------|--|----------------------------|---|
| Desa di Pasuruan- Probolinggo | Jawa Timur | ≥55 pekerja per kegiatan | >60% penganggur dan miskin | PKTD dianggap bermanfaat dan meningkatkan pendapatan (Sofi, 2020) |
| Desa Gandu (Ponorogo) | Jawa Timur | 40-60 pekerja per kegiatan | Mayoritas keluarga miskin | Program memberdayakan masyarakat, tetapi belum menurunkan kemiskinan secara makro (Jazuli, 2021) |
| Desa Sariwangi | Jawa Barat | 30-50 pekerja per kegiatan | 50-70% miskin/marginal | PKTD berjalan efektif secara prosedur, namun terkendala birokrasi dan lapangan kerja (Rohimah et al., 2025) |

Pengaruh Program PKTD terhadap Kemiskinan

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) secara umum memiliki dampak positif terhadap kemiskinan, tetapi hanya terbatas karena sifatnya jangka pendek dan bergantung pada seberapa besar dan baik implementasinya di setiap desa. PKTD berhasil meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, tetapi belum cukup kuat untuk mengurangi kemiskinan secara keseluruhan dan permanen ([Prihatini et al., 2024](#)).

a. Pengaruh positif terhadap kemiskinan

Beberapa kajian akademik menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat (PKTD) didefinisikan sebagai program pemberdayaan masyarakat yang menyoal kelompok penganggur, keluarga miskin, dan kelompok marginal untuk memberikan tambahan upah, meningkatkan daya beli, dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di desa.

b. Pengaruh yang terbatas terhadap angka kemiskinan.

Meskipun memberikan manfaat langsung, beberapa penelitian menunjukkan bahwa PKTD belum mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara makro. Evaluasi PKTD di Kabupaten Jember, misalnya, menunjukkan bahwa program telah mendorong kelompok marginal (meningkatkan pendapatan dan partisipasi), tetapi belum cukup kuat untuk menurunkan kemiskinan dan

pengangguran karena program bersifat temporer dan memiliki anggaran terbatas ([Sofi, 2020](#)).

Penelitian tentang penerapan PKTD Dana Desa di beberapa desa menunjukkan bahwa PKTD mampu menyerap minimal 50 hingga 55 pekerja per kegiatan, banyak di antaranya tidak memiliki pekerjaan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, pengaruh PKTD lebih kuat daripada pemutus magang karena ketergantungan pada pekerjaan musiman dan kekurangan pelatihan keterampilan.

Faktor Penghambat Program Padat Karya Tunai Desa

Studi tentang penerapan PKTD Dana Desa di beberapa desa menunjukkan bahwa PKTD dapat merekrut minimal lima puluh hingga lima puluh lima pekerja untuk setiap kegiatan, dengan banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Karena ketergantungan pada pekerjaan musiman dan kekurangan pelatihan keterampilan, PKTD memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pemutus magang.

a. Regulasi dan birokrasi yang rumit

Banyak penelitian menunjukkan bahwa aparat desa menghadapi kesulitan untuk memahami dan melaksanakan program PKTD karena regulasi yang rumit dan tidak konsisten. Hal ini menyebabkan masalah di lapangan, seperti kegiatan yang tidak sepenuhnya mengikuti prinsip swakelola, target sasaran menyimpang, dan prosedur administrasi yang lambat atau tidak teratur.

b. Terbatasnya sumber daya dan kapasitas aparat desa

Banyak desa menghadapi kendala besar dalam perencanaan dan pelaksanaan PKTD karena mereka tidak memiliki sumber daya manusia, kapasitas aparat, dan tenaga ahli yang cukup. Akibatnya, banyak desa tidak memahami dengan baik bagaimana menyusun APBDes, RAB, dan mekanisme PKTD, sehingga perencanaan kegiatan menjadi tidak efektif dan kualitas output pekerjaan menurun.

c. Keterbatasan anggaran dan sumber dana

PKTD dapat memanfaatkan Dana Desa, tetapi jumlah dana yang terbatas sering mengurangi alokasi yang efektif untuk PKTD. Ini terjadi di beberapa desa di mana penyerapan tenaga kerja rendah dan volume pekerjaan kecil. Akibatnya, PKTD hanya berfungsi sebagai penopang sementara dan tidak mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

d. Masalah Sosial dan Partisipatif

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semangat gotong royong berkurang, partisipasi perempuan rendah, dan transparansi program rendah menyebabkan PKTD tidak selalu tepat sasaran dan inklusif. Selain itu, kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang PKTD pada masyarakat menyebabkan

masyarakat tidak memahami manfaat dan mekanisme program, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi dan ketidakpercayaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

e. Keterbatasan teknis dan keahlian karyawan

Dalam beberapa penelitian, kualitas dan keahlian karyawan serta keterbatasan pengetahuan teknis di lapangan telah diidentifikasi sebagai faktor penghambat utama. Infrastruktur yang dibangun melalui PKTD cenderung rendah kualitasnya jika tidak mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Ini berpotensi mengurangi nilai manfaat jangka panjang dan mempercepat kerusakan fisik.

f. Keterbatasan koordinasi dan pendampingan

Studi telah menunjukkan bahwa program PKTD lambat dan tidak terintegrasi karena kurangnya sinkronisasi dan pendampingan antara pemerintah desa, pendamping desa, dan lembaga terkait. Komunikasi dan penyelesaian masalah di lapangan menjadi lebih sulit karena lokasi pendampingan desa yang jauh dan kurangnya koordinasi antar-stakeholder ([Novanto & Wibawani, 2023](#)).

Secara ringkas, beberapa penghalang utama PKTD adalah regulasi yang rumit, kapasitas aparatur yang terbatas, kekurangan dana dan anggaran, masalah sosial dan partisipatif, kekurangan keahlian karyawan, dan kurangnya koordinasi dan pendampingan. PKTD akan tetap berfungsi sebagai program penopang jangka pendek daripada sebagai alat penurunan kemiskinan yang berkelanjutan jika komponen ini tidak diperbaiki.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) memiliki efektivitas yang cukup baik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong partisipasi kelompok miskin di tingkat desa, namun dampaknya terhadap penurunan kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan masih terbatas karena sifat program yang jangka pendek dan bergantung pada kualitas implementasi di masing-masing daerah. Implikasi penting dari temuan ini menunjukkan bahwa PKTD lebih berperan sebagai instrumen penopang ekonomi sementara daripada solusi utama dalam pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan penguatan pada aspek keberlanjutan program, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta integrasi dengan program pemberdayaan lain berbasis peningkatan keterampilan dan ekonomi produktif. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji efektivitas PKTD dalam jangka panjang dengan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan antarwilayah secara lebih mendalam, sementara secara praktis

pemerintah perlu menyederhanakan regulasi, meningkatkan pendampingan, memperkuat pelatihan tenaga kerja, serta memastikan transparansi dan ketepatan sasaran agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan di perdesaan.

Daftar Pustaka

- Adib. (2020). *Efektivitas Cash For Work Indonesia: Studi Implementasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Di Kabupaten Purworejo*.
- Andora, J. (2021). *Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa Di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Ariel, T., Ramadhani, P., Mustofa, A., & Haryati, E. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai untuk Meningkatkan Kesejahteraan di Kota Surabaya*. 11(2), 122–135.
- Basri. (2021). *Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Damanik, D. (2024). *Metode Penelitian Pendidikan Dasar*.
- Haryono, D., & Silviana, E. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Padat Karya Tunai Desa Dari Dana Desa Di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9, 441–453.
- Jazuli, C. C. (2021). *Analisis Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*.
- Juventia, I. (2023). *Efektivitas padat karya tunai desa dalam menopang perekonomian desa pada masa pandemi*. *Universitas Negeri Malang*.
- Kurnia, U. E., & Widhiasthini, N. W. (2021). *Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dirumuskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan nasional salah*. 5, 148–161.
- Lexy J Moleong, T. S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Natalia, I. D., & Sukmana, H. (2025). *Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dukuhsari , Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 9(November 2025), 1972–1982.
- Novanto, H. E., & Wibawani, S. (2023). *Implementasi program padat karya tunai desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 179–188.
- Prihatini, J., Pratama, D., & Wijaya, I. M. A. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara*. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(5), 1405–1414. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1369>
- Primantoro, A. Y. (2025). *Data BPS: Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Hampir 24 Juta Orang*

pada Maret 2025. Kompas.Id.

- Purwadinata, S., Karmeli, E., Fitriani, I., Suprianto, Asmini, & Sutanty, M. (2022). Menelisik Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dalam Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2).
- Putri, A. T., & Lukman, A. I. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 11(1), 54–63.
- R.Jatmiko, A., Rohman, M. F., & Masruroh. (2024). Implementasi Dana Desa Terhadap Program Padat Karya Tunai Desa Dan Bantuan Langsung Tunai Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19 Di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. 11(2), 22–34.
- Rahayu, S. K., Briliandiva, A. A., Dewi, S. N. F., Alghazy, K. B., Purwanto, D. A., Murjianto, T., Sari, F. P., Nugroho, A. S., Putri, N. S. A., Mandika, Q. Z., Inayati, F., Harafandi, M. D., Hayati, N., Ar'rabani, A. D., Solo, A. J. B., & Zubaedah, A. (2025). LAPORAN AKHIR Padat Karya Tunai.
- Risa, & Hajar. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Repositori Institusi Universitas Sumatra Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/45595>
- Rohimah, S. N., Kurnia, D., Fujilestari, N. A., Jenderal, U., Yani, A., Parongpong, K., Barat, K. B., Karya, P., & Desa, T. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Padat Karya Tunai Desa Dalam. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 02(02).
- Rouf, A., Pupaniingtyas, A., & Widiyanto, K. M. (2024). Implementasi Program Padat Karya Sebagai Upaya Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(06), 107–116.
- Setiawan, M. Y. A., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Vol 10 nom, 665–680. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p665-680>
- Sofi, I. (2020). Implementasi Padat Karya Tunai. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 25–35. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.25-35>
- Sumarto, R. H., & Dwiantara, L. (2019). Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Oleh : 2(2), 65–74.
- Tiara Rama Dian, M. F. M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai(Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). <https://doi.org/10.26740/publika.v7n4.p%25p>